

BAB IV

ANALISIS KONSEP PLURALISME DAN PARADIGMA PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID

A. Pemikiran Pluralisme Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan presiden keempat Indonesia. Beliau merupakan tokoh masyarakat atau figur yang fenomenal, baik pendapat, sifat, maupun tindakan beliau selalu menuai kontroversi. Abdurrahman Wahid juga terkenal akan sifatnya yang unik yaitu sifat humoris. Beliau menjadi banyak disukai masyarakat karena humornya, namun banyak pula yang mengkritik sifat humorisnya dan dianggap tidak pernah serius dalam menghadapi masalah dalam pemerintahan.

Pemikiran Gus Dur konon selalu kontroversial dan sulit dipahami. Pemikiran beliau sering menabrak *mainstream* pemahaman masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim dan Nahdlatul Ulama (NU) yang ia nahkodai. Risikonya, belum lagi pemikiran itu dipahami, Gus Dur sendiri telah dicaci.

Sebenarnya jika dicermati dengan baik, Pemikiran Gus Dur memanglah kontroversial, akan tetapi hal tersebut menggambarkan garis-batas pemahaman awam masyarakat yang memang rapuh dan perlu digedor. “Gedoran pemikiran” itu yang telah Gus Dur lakukan, demi pemahaman yang lebih mendalam atas berbagai persoalan yang sebelumnya hanya dipikirkan masyarakat secara selang pandang.⁶²

Sifat Abdurrahman Wahid yang lain adalah gaya bicaranya yang tergolong berani dan ceplas ceplos, kalimat cerminan dari sosok beliau yang sangat terkenal yaitu kalimat “*Gitu Aja Kok Repot!*” Ungkapan dan pendapatnya yang berani memang selalu menarik perhatian masyarakat. Abdurrahman Wahid juga memiliki pemikiran dan perjuangan yang berperan dalam perkembangan pemerintahan Indonesia. Misalnya saja tentang pemerintahan demokrasi yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan untuk semua masyarakat dan kelompok minoritas tertentu. Sehingga Abdurrahman Wahid dikenal sebagai tokoh Pluralisme.⁶³

Abdurrahman Wahid adalah sosok yang cukup dipertimbangkan dalam hal mensosialisasikan ide pluralisme agama. Abdurrahman Wahid sebagai salah satu tokoh yang cukup berpengaruh dan tak kalah kontroversialnya berkenaan dengan segala bentuk aksi dan pemikirannya. Ia menjadi pondasi pelindung atas berbagai ketidakadilan setidaknya begitulah anggapan banyak orang yang pernah mengenal sosok, kiprah dan perjuangannya membela hak minoritas dan berbagai ketimpangan sosial lainnya di negeri ini.

Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam pidatonya pada saat pemakaman almarhum Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa beliau merupakan Bapak “Pluralisme Indonesia” meskipun tidak menyebutkan istilah pluralisme agama, namun mencermati kiprah dan aksi Abdurrahman Wahid dalam kaitannya dengan lintas agama agaknya hal tersebut mengarah pada pengertian

⁶² Syaiful Arif, *Humannisme Gus Dur Pergumulan Islam dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013) hlm. 59

⁶³ Arif Wijayanto, *Abdurrahman Wahid sebagai inspirasi penciptaan lukisan*, E-Journal Prodi : Pendidikan Seni Rupa, 2016, hlm. 32

pluralisme agama. Pluralisme agama dalam pandangan Abdurrahman Wahid lebih ditekankan pada pandangan keterbukaan untuk menemukan kebenaran di mana pun juga, selain itu pluralisme mesti teraktualisasi dalam bertindak dan berpikir karena inilah yang akan melahirkan toleransi.

Abdurrahman Wahid adalah salah satu tokoh yang hampir dapat diterima oleh semua kelompok agama, bahkan ketika wafatnya banyak tokoh agama lain merasa kehilangan dan turut mendoakan kepergian Abdurrahman Wahid untuk selama-lamanya. Hal itu dikarenakan kedekatan Abdurrahman Wahid dengan umat agama lain cukup baik. Abdurrahman Wahid mengembangkan pandangan anti eksklusivisme agama. Menurutnya, berbagai peristiwa kerusuhan yang berkedok agama di beberapa tempat adalah akibat adanya eksklusivisme agama.⁶⁴

Fathorrahman menjelaskan bahwa gagasan pluralisme yang diusung oleh Gusdur, memiliki tiga dimensi. Pertama, pluralisme di level pemikiran (*plural in mind*). Kedua, pluralisme di level perilaku (*plural in attitude*) Ketiga, pluralisme di level tindakan (*plural in action*).⁶⁵

Pada level pemikiran, menurut Gus Dur, pluralisme mengakar bukan hanya dalam bagaimana seseorang bertindak tetapi dalam bagaimana seseorang berfikir. Maka, beberapa pemikiran Gus Dur yang tertuang dalam berbagai tulisan banyak mengeksplorasi berbagai ide yang seringkali melampaui zamannya. Salah satu gagasannya bahwa pluralisme secara tegas diakui didalam kitab suci Al-

⁶⁴ Surya Adi Sahfutra, *Gagasan Pluralisme Agama Abdurrahman Wahid Untuk Kesetaraan Dan Kerukunan*, Religi Jurnal Studi Agama-Agama 10, no. 1 (2014), hlm. 95

⁶⁵ Fathorrahman, *Fikih Pluralisme dalam Perspektif Ulama NU*, (Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 49, no. 1) hlm. 107

Qur'an dan secara tegas pula mendeklarasikan bahwa pluralisme masyarakat dari segi agama, etnis, warna kulit, bangsa dan sebagainya merupakan keharusan sejarah yang menjadi kehendak Allah. Karena itu, upaya penyeragaman dan berbagai bentuk homogenisasi yang lain, termasuk dalam hal pemahaman dan implementasi ajaran agama, merupakan sebuah pemahaman yang bertentangan dengan semangat dasar Al-Qur'an.

Pada level perilaku, Gus Dur melibatkan diri dalam berbagai komunitas pro-demokrasi dan Hak Asasi Manusia serta komunitas lintas agama. Kehadiran Gusdur di berbagai forum tersebut, menjadi teladan bagi banyak kalangan agar tidak hanya membatasi pergaulan secara homogen, namun harus membuka diri terhadap berbagai kalangan meskipun dalam prosesnya seringkali dihadang oleh berbagai stigmatisasi dari berbagai beberapa kelompok ekstrem kanan yang radikal. Kemampuan Gus Dur dalam menjalin persahabatan dengan berpihak, baik kepada kelompok yang dipersepsikan sebagai "musuh" oleh pihak-pihak tertentu, maupun pihak yang selama ini disub-ordinasi oleh sebuah sistem yang berlaku dalam komunitas kecil maupun komunitas besar, semakin memposisikan Gus Dur sebagai figur yang mampu mempersonifikasi sifat kenabian dalam dirinya. Karena, perlawanan Gusdur terhadap kelompok yang memusuhi bukan dengan cara refresif-reaksiner melainkan dengan persuasive akomodatif.

Pada level tindakan bisa dilihat ketika Gusdur didapuk menjadi Presiden yang ke-4 di tahun 1999. Abdurrahman Wahid yang dikemudian hari dijuluki bapak Pluralisme, gigih memperjuangkan hak-hak kaum minoritas, antara lain dengan mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1967 tentang agama

dan adat istiadat China. Dengan dicabutnya inpres ini etnis Tionghoa bebas merayakan tahun baru Imlek, dan menjalankan tradisi-tradisi mereka seperti Barongsai dan Liang-Liong. Keputusan ini kemudian dilanjutkan oleh presiden Megawati dengan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional melalui Keputusan Presiden No. 19 tahun 2002. Selain itu, Gusdur juga meminta maaf kepada keluarga para korban pembantaian massal 1965-1966, dan beliau mengusulkan pencabutan TAP MPRS No. XXV/1966 yang menyatakan bahwa PKI dan ormas-ormasnya adalah organisasi terlarang di Indonesia.

Melalui ketiga level tersebut, Gus Dur selalu berupaya menterjemahkan paham pluralisme dalam dua dimensi sekaligus, yaitu teologis dan sosiologis. Secara teologis, gagasan pluralisme Gus Dur dihadapkan pada tantangan iman, yaitu bagaimana mendefinisikan iman umat Islam ditengah keragaman iman yang lain yang diyakini oleh pemeluk agama lain. Sedangkan secara sosiologis, gagasan pluralisme Gus Dur dihadapkan pada sejumlah fakta sosial, yaitu bagaimanakah hubungan antar umat beragama, lebih khusus lagi hubungan antar iman ditengah pluralisme agama.⁶⁶

Islam menurut Abdurrahman Wahid harus tampil sebagai pemersatu bangsa dan pelindung keragaman dan mampu menjawab tantangan modernitas sehingga Islam lebih inklusif, toleran, egaliter dan demokratis. Nilai Islam yang universal dan esensial lebih diutamakan dari pada legal simbolis. Islam mewarnai

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 108-109

kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa membawa “embel-embel” Islam, akan tetapi ruh keislaman itu menyatu dalam wajah nasionalisme.⁶⁷

Misi Abdurrahman Wahid dalam konsep pluralismenya adalah berusaha menghilangkan sikap kebencian antara agama satu dengan lainnya, sebab kebencian dapat menimbulkan permusuhan. Timbulnya permusuhan bertolak belakang dengan misi suci agama yang menyerukan perdamaian. Pluralis meniscayakan adanya keterbukaan sikap toleran dan saling menghargai kepada manusia secara keseluruhan. Menurut Abdurrahman Wahid, agama adalah kekuatan inspiratif yang membentuk kekuatan moral. Agama harus membentuk etika dari masyarakat. Menurut Abdurrahman Wahid hakikat Islam itu damai dan anti kekerasan, Islam menghendaki kebebasan. Agama mengajarkan konsep etika kepada pemeluknya. Tetapi etika tidak harus dijadikan sebagai aturan formal dalam sebuah tatanan kehidupan. Agama tidak boleh dikaitkan dengan urusan negara dan agama diposisikannya sebagai sesuatu yang individual (bersifat pribadi) dan mengandung ajaran moral.

Gagasan pluralisme Abdurrahman Wahid bertujuan agar menciptakan harmonisasi di masyarakat Indonesia yang mejemuk. Sebagai konsekuensi dari gagasannya ini, Abdurrahman Wahid selalu berada di garda depan ketika ada kekuatan, baik itu kekuatan negara atau masyarakat, yang ingin mencederai kebhinekaan di republik ini. Bagi Abdurrahman Wahid, kebhinekaan adalah

⁶⁷ Musda Asmara, *Islam dan Pluralisme Dalam Pembangunan Politik di Indonesia Perspektif Pemikiran Abdurrahman Wahid*, Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan 2, no.1, hlm. 73–74

sunatullah yang tidak berhak bagi siapa pun untuk mengubahnya. Justru keanekaragaman dapat menjadi berkah jika dikelola dengan baik. Sehingga menjadi mutlak diperlukan pemahaman yang sama untuk menghormati dan menghargai dalam upaya mewujudkan harmonisasi di kalangan anak bangsa. Abdurrahman Wahid adalah sosok yang sangat terbuka terhadap perkembangan intelektual, selain itu ia juga terbuka terhadap orang yang berpandangan agama lain. Tanpa memperlemah keyakinan pada agama Islam, sepenuhnya ia menerima keberadaan umat beragama lain. Dengan keyakinan kuat kepada ajaran Islam, ia dengan mudah dapat berbaur dengan agama-agama lain.⁶⁸

Budiyono menyebutkan bahwa peran negara diperlukan untuk menciptakan dan memelihara suasana kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, damai, sejahtera, dan bersatu. Pemerintah bertugas memberikan bimbingan dan juga pembinaan pada seluruh agama di Indonesia tanpa membedakan-bedakannya. Pemerintah juga bertugas menjamin keamanan, kenyamanan beragama masyarakatnya, dan juga memelihara kerukunan antarumat.

Di Indonesia, baru enam agama yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Padahal, sebenarnya agama yang ada di Indonesia lebih dari enam. Karena itu, diluar dari enam agama ini dianggap sebagai aliran kepercayaan. Adapun agama Konghucu baru diakui pemerintah pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.⁶⁹

⁶⁸ Eko Setiawan, “Konsep Teologi Pluralisme Abdurrahman Wahid Dalam Meretas Keberagaman Di Indonesia,” *Asketik* 1, no. 1 (2017), hlm. 62–63

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 133

Pemikiran Abdurrahman Wahid pada awal pencariannya akan nilai-nilai keagamaan sedikit berbeda dengan toko-tokoh yang lainnya, khususnya dari kalangan santri. Abdurrahman Wahid dikenal dengan ideologi demokrasi, liberal, dan kesatuan beliau. Demokrasi menunjukkan bahwa ada kebebasan setiap insan untuk mengungkapkan akan pandangannya demi kebaikan bersama. Sementara itu liberal juga menekankan akan kebebasan berpikir itu sendiri untuk menemukan sesuatu yang lebih baik. Adapun kebebasan yang dimaksud disini tentu kebebasan yang memiliki norma-norma dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan kebebasan yang kebablasan. Dan yang terakhir adalah kesatuan, demokrasi dan liberal dikunci dengan kata kesatuan agar tidak sampai menimbulkan gesekan yang mengakibatkan perpecahan. Justru sebaliknya, lebih mempererat silaturahmi persaudaraan satu sama lain. Abd. Rahman menyebutkan bahwa kebebasan dalam demokrasi janganlah dimaknai untuk bebas merebut kekuasaan yang sudah sah dan terpilih secara demokratis, apalagi dijalankan sesuai dengan undang-undang. Tentunya, yang paling elok untuk dilakukan dalam demokrasi adalah membantu sang pemimpin membangun bangsa, bukan berusaha menjatuhkannya.⁷⁰

Indonesia adalah sebuah negara yang pluralis, dimana terdiri dari berbagai macam ras, suku, agama dan adat-istiadat. Melihat kenyataan itu Gus Dur berpendapat bahwa nilai-nilai Indonesia yang harus dijunjung tinggi yaitu berupa solidaritas sosial, yang didasarkan pada rasa kebangsaan tanpa mengucilkan getaran rasa impulsif untuk mengutamakan kelompok-kelompok yang lebih sempit, nilai-nilai yang menampilkan watak kosmopolitan, yang masih diimbangi

⁷⁰ Abd. Rahman, *Gitu Aja Kok Repot*, (Yogyakarta: Diva Press, 2014), hlm. 75

oleh rasa keagamaan yang kuat, kesediaan untuk mencoba gagasan-gagasan pengaturan kembali masyarakat (*social engineering*) berlingkup luas, tetapi dengan sikap rendah hati yang timbul dari kesadaran akan kekuatan masyarakat.⁷¹

Pluralisme dapat dipahami pertama sebagai suatu teori yang menentang kekuasaan negara monolitik. Kedua yaitu sebagai keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan kelembagaan.

Untuk mewujudkan dan mendukung pluralisme tersebut diperlukan adanya toleransi. Meskipun hampir semua masyarakat yang berbudaya kini sudah mengakui adanya kemajemukan sosial, namun dalam kenyataannya permasalahan toleransi ini masih sering muncul dalam suatu masyarakat, termasuk di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Persoalan yang muncul ini terutama berhubungan dengan ras atau agama.⁷²

Gus Dur sangat mendukung pluralisme, baik pluralisme sosial maupun politik dan hal ini dinyatakan tidak hanya dalam bentuk ide tetapi juga sikap. Pandangannya tentang posisi kedaulatan rakyat dan posisi *Syari'ah* memberikan landasan bagi hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan nilai-nilai demokrasi, seperti persamaan, pluralisme dan toleransi.

Oleh karena itu, dalam konteks kedudukan muslim dan non muslim, suatu hal yang menjadi titik krusial dalam kehidupan sosial dan politik di dunia Islam,

⁷¹ Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKIS, 1999), hlm. 109

⁷² Masykuri Abdillah, "*Gus Dur Tentang Demokrasi dan Pluralisme*", Ahmad Fathoni Rodli dan Fahrudin Salim, *Berguru Kepada Bapak Bangsa*, hlm 195

Gus Dur melakukan reinteroretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits dan hal ini juga dilakukan oleh ulama-ulama klasik.⁷³

Dari pemikiran-pemikirannya itulah, Gus Dur patut mendapat gelar sebagai “Bapak Pluralisme” karena beliau bisa menerima perbedaan tanpa adanya gesekan. Bahkan bagi beliau dengan adanya perbedaan justru menjadi pengikat yang kuat untuk dapat bersatu. Agama-agama yang masuk kategori sebagai minoritas menaruh hormat kepada Gus Dur. Beliau mampu merangkul berbagai kalangan umat beragama untuk duduk berdampingan sehingga toleransi beragama terwujud, seperti yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 29, yang bagi beliau tidak hanya slogan tapi benar-benar dipraktikkan.

B. Islam dan Kemanusiaan dalam Pandangan Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid merupakan tokoh yang banyak menyimpan paradoks. Sebut saja bahwa dia adalah seorang tokoh yang sangat dipandang enteng, tetapi juga sangat dihormati, dan juga sekaligus tokoh yang sangat populer. Sebagai seorang ulama Jawa tradisional, atau seorang cendekiawan islam, Gus Dur kadang memperlihatkan sisi dirinya yang berpandangan sempit. Akan tetapi, dia juga fasih dalam menggunakan empat bahasa asing dan dapat membaca tiga bahasa asing lainnya. Secara pribadi, Abdurrahman Wahid adalah seorang yang sederhana dan bersahaja. Namun demikian, siapa saja yang pernah bersamanya akan selalu berkomentar bahwa dia bisa menjadi seorang yang sangat

⁷³ *Ibid*, hlm. 196

kharismatik dan menarik. Di sisi penampilan fisiknya, jelas sekali Gus Dur mempunyai ketajaman pikiran yang jarang dimiliki oleh kebanyakan orang.⁷⁴

Salah satu sifatnya yang menjengkelkan orang adalah kecenderungannya untuk bersikap sembarangan atau yang ramai dikenal dengan istilah nyeleneh. Dia cenderung tidak teliti atau dan sering tampak ceroboh dalam membuat pernyataan di depan umum. Akan tetapi, dia juga seorang yang sangat cerdas dan hati-hati dalam kata-katanya.⁷⁵

Secara mendasar, prinsip dan tujuan pemikiran Gus Dur mengacu pada pembelaan terhadap harkat tinggi kemanusiaan, yang pada satu titik ia dasarkan pada tradisi keislaman yang mendalam. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa corak pemikiran Gus Dur mengacu pada pertemuan antara keislaman dan kemanusiaan. Hanya saja prinsip keislaman ini bukan satu-satunya prinsip yang menjadi dasar semua pemikiran Gus Dur. Prinsip keislaman lebih merupakan landasan awal yang menjadi kondisi “psiko-kultural” bagi segenap pemikirannya. Jika meminjam Bourdieu prinsip keislaman adalah *habitus*, yang telah menstruktur dalam alam bawah sadar (*structured structure*) Gus Dur, dan oleh karenanya menjadi pola strukturasi hubungan antara pemikiran Gus Dur dan persoalan yang dipikirkannya. Atau jika meminjam Habermas, prinsip keislaman adalah *Lebenswelt Komunikatif* Gus Dur. Ia merupakan latar belakang kultural yang mengondisikan pola komunikasi dalam keseharian Gus Dur sehingga secara

⁷⁴ Greg Barton, *Biografi Gusdur*, (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2002), hlm.19

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 20

otomatis prinsip keislaman cenderung menjadi “kacamata” tak tersadari dalam pandangan pemikirannya.⁷⁶

Pertemuan antara keislaman dan kemanusiaan Gus Dur terbaca di dalam pemijakannya atas Q.S. al Maidah/5: 32.

وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُسْرُفُونَ

“Barangsiapa yang menolong kehidupan seseorang maka seakan ia telah menolong semua umat manusia”

Pertemuan ini juga tersirat dalam penjelasan Gus Dur bahwa agama dan kemanusiaan haruslah disatukan. Lebih lanjut beliau katakan “Agama tanpa kemanusiaan akan melahirkan fundamentalisme”, demikian tandasnya. Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa Gus Dur mendasarkan prinsip kemanusiaan di dalam tradisi Islam serta menghadirkan prinsip kemanusiaan ke dalam prinsip keislaman.⁷⁷

Dalam kaitan ini, prinsip kemanusiaan Gus Dur selaras dengan humanisme modern. Pertemuan Gus Dur dengan humanisme ini bisa dilacak dari pertualangan intelektualnya, baik secara literal (melalui buku) maupun secara riil (melalui perjalanan intelektual Gus Dur di Eropa). Secara literal, perjumpaan dengan humanisme Eropa terlacak dari pembacaan Gus Dur atas buku Eropa-sentris, misalnya *Aera Eropa* karya Jan Romein. Menurutnya, buku inilah yang membuat Gus Dur terpesona dengan Eropa, dengan segenap prestasi peradaban sejak

⁷⁶ Syaiful Arif, *Humannisme Gus Dur Pergumulan Islam dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta Ar-Ruzz Media, 2013) hlm. 61

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 63

humanisme, rasionalisme, dan kosmopolitanisme yang tergelar dalam revolusi kebudayaan: *Renaissance, Aufklarung*, dan modernisasi.⁷⁸

Keterpesonaan Gus Dur dengan kebudayaan Eropa khususnya tertuju pada humanisme, rasionalisme, dan demokrasi. Atas humanisme, tentu Gus Dur terpesona dan sepakat dengan harkat dan martabat manusia di atas institusi apapun. Atas rasionalisme, Gus Dur terpicat dengan penggunaan akal budi demi penyempurnaan peradaban manusia. Dalam satu tulisannya, *Universalisme dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam*, Gus Dur mendaulat penggunaan rasionalitas sebagai pengangkatan lebih tinggi, nilai-nilai Islam ke ranah peradaban modern yang kosmopolitan. Sementara demokrasi merupakan sistem politik ideal yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak dasar manusiawi.

Oleh karena itu, selayak perjuangan kemanusiaan di Eropa, prinsip kemanusiaan Gus Dur kemudian menurunkan beberapa prinsip konstitutif yang membentuk dan menjamin kemanusiaan tersebut. dalam kaitan inilah prinsip kemanusiaan bertemu dengan prinsip keislaman. Selain dari humanisme Eropa, beliau yang juga merupakan seorang Muslim mendasarkan kemanusiaan itu di dalam tradisi Islam. Yakni, dalam apa yang ia sebut sebagai *ghayat al-maslahat* (tujuan utama kemaslahatan) yang disediakan oleh tujuan utama syariat (*maqashidal-syaria'ah*) berupa perlindungan hak hidup, hak beragama, hak berpikir, hak kepemilikan, dan hak atas kesucian keluarga.⁷⁹

Dengan adanya penjaminan atas kebebasan, setiap warga negara bisa menentukan dirinya sendiri sesuai dengan pandangan hidup yang diyakininya.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 64

⁷⁹ *Ibid*, hlm.65

Dalam terang kebebasan ini pula, Gus Dur memperjuangkan kebebasan beragama dan kebebasan berpikir. Dua macam kebebasan ini fundamental dalam masyarakat demokratis karena ia menggambarkan terpenuhinya hak-hak dasar yang paling asasi, yakni beragama dan berpikir. Dari sinilah kita mengenal satu sisi perjuangan Gus Dur sebagai seorang Muslim liberal dan pluralis. Liberal dalam artian karena ia menempatkan kebebasan berpikir dalam kerangka pemikiran keislaman. Adapun pluralis karena penghormatan dan keakrabannya dengan kerja-kerja *inter-faith* yang mendaulatkan Gus Dur sebagai “Bapak Pluralisme”. Pada titik inilah, perjuangan Gus Dur dan pola keislamannya yang liberal dan pluralis, mesti kita letakkan dalam kerangka pembelaan atas hak dasar manusiawi tersebut. Dengan demikian, prinsip kemanusiaan telah menurunkan dua prinsip turunan, yaitu kebebasan beragama dan kebebasan berpikir.

Gus Dur sering menganalogikan konsep pluralisme yang ia miliki ibarat sebuah rumah besar yang terdiri atas banyak kamar dan setiap orang memiliki kamarnya sendiri-sendiri. Saat di dalam kamar, setiap orang dapat merawat dan menggunakan kamarnya serta berhak melakukan apapun di dalam kamarnya. Namun ketika berada di ruang tamu atau ruang keluarga, maka setiap penghuni kamar wajib melebur untuk menjaga kepentingan rumah bersama. Semua penghuni kamar wajib bekerjasama merawat, menjaga, dan melindungi keseluruhan bagian rumah tersebut. Ketika terjadi serangan dari luar, maka mereka tanpa mempermasalahkan asal kamar harus bersatu melawan para penyerang yang ingin merusak keberadaan rumah tersebut. Bila dihubungkan dalam konteks negara, maka seluruh warga negara yang menjadi penghuni rumah

NKRI wajib merawat, menjaga, dan melindungi rumah besar NKRI yang telah dibangun di atas fondasi Pancasila dan keragaman identitas primordial. Lanjutnya, pluralisme adalah sebuah desain Tuhan agar manusia dapat saling mengenal dan saling belajar satu sama lain agar dapat saling melengkapi dan menyempurnakan. Dengan kata lain, siapapun yang mengutuk pluralisme, maka sama saja ia telah mengutuk Tuhan, sang pencipta keragaman di muka bumi ini. Untuk memperkuat gagasan pluralisme-nya, Gus Dur sering mengutip salah satu ayat dari al-Qur'an sebagai landasan teologisnya, yakni Surat Al-Hujuraat Ayat 13 yang tak hanya sekedar beliau maknai ayat tersebut secara tekstual, namun ia melangkah lebih maju dengan mengelaborasi pemaknaan ayat tersebut. Menurutnya, redaksi ayat tersebut tidak hanya ditujukan kepada kaum muslim, melainkan juga ditujukan secara tegas kepada seluruh umat manusia agar mereka dapat menjunjung tinggi kesetaraan dan mengedepankan dimensi kemanusiaan dalam segala urusan.⁸⁰

Selain mengutip ajaran Al-Quran dalam menyebarkan gagasan pluralisme, Gus Dur juga menggunakan Pancasila sebagai landasan filosofis terhadap gagasannya tersebut. Menurutnya, Pancasila tak seharusnya dipertentangkan dengan Islam karena isi Pancasila sangat sejalan dengan nilai-nilai luhur Islam. Dengan kata lain, Pancasila adalah bentuk pbumian ajaran Islam (pribumisasi Islam) dalam konteks keindonesiaan. Pancasila di mata Gus Dur adalah sebuah ikhtiar politik yang sangat visioner oleh para pendiri bangsa karena orientasinya

⁸⁰ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006) hlm. 25-26.

sangat jauh ke depan. Pancasila adalah suatu jalan tengah (kompromi) antara sekularisme dan formalisme agama (Islam).⁸¹

Gus Dur sendiri adalah tokoh yang anti terhadap sekularisme, yang dipahami sebagai paham yang menolak keberadaan agama, karena ia merupakan individu yang sangat mencintai keyakinan dan tradisi agamanya⁸². Di sisi lain, ia juga konsisten menolak bentuk formalisme agama karena hal tersebut akan mereduksi makna agama hanya sebatas kepentingan ideologis dan platform politik yang sifatnya sempit. Selain itu, formalisme agama juga rentan terhadap praktik diskriminasi yang menempatkan kaum non-muslim sebagai warga kelas dua⁸³, sehingga akan bertentangan dengan prinsip persamaan yang dijunjung tinggi oleh ajaran Islam.

Selain melandaskan gagasan pluralismenya pada Al-Qur'an dan Pancasila, Gus Dur juga menggunakan konstitusi sebagai landasan legal-formal terhadap gagasannya tersebut. Menurutnya, sudah saatnya hukum menjadi panglima dalam setiap pengambilan keputusan karena Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukum seharusnya berfungsi sebagai pelindung bagi seluruh warga negara tanpa pandang bulu. Untuk itulah Gus Dur kerap mengkritik dan selalu berada di garda terdepan apabila ada pihak yang sering melegalkan aksi kekerasan atas nama agama dalam bentuk apapun.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 118

⁸² Greg Barton, *Pengantar: Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Cet. II., Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. xxix

⁸³ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 4

C. Hubungan Antara Agama, Negara dan Pancasila Dalam Pandangan Abdurrahman Wahid

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, ras, dan agama. Semua tersebar diseluruh tanah air Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari puluhan ribu pulau. Dengan beraneka ragamnya penduduk Indonesia itulah sehingga para pejuang pemuda Indonesia membuat suatu ikrar yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yang mengaku satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa, yaitu Indonesia.⁸⁴ Sehingga bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa majemuk, namun kemajemukan itu dipersatukan dengan suatu falsafah sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Terlebih lagi Pancasila diawali dengan sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila pertama ini sebagai sila yang mempererat kerukunan umat beragama di Indonesia. Ditegaskan lagi dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi: *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"*, hal ini bertujuan agar sesama rakyat Indonesia untuk bisa saling menghargai atau menghormati berbagai perbedaan keyakinan. Selain itu, negara akan melindungi, menjamin, membina, dan mengarahkan kehidupan beragama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya

Pada hakikatnya, sebuah masyarakat heterogen yang sedang tumbuh, seperti bangsa kita, tentu sulit untuk mengembangkan sikap saling pengertian yang mendalam antara beraneka ragam unsur-unsur etnis, budaya daerah, bahasa, dan kebudayaannya. Hal inilah yang menjadi masalah pokok dalam hal hubungan

⁸⁴ Jonar TH Situmorang, *Gus Dur itu isme Biografi Sang Pluralis*, (Yogyakarta : Arruzz Media, 2020), hlm.129

hubungan antaumat beragama. Bangsa kita akan mampu menjadi kokoh apabila umat beragama yang berbeda dapat saling mengerti satu sama lain, bukan hanya sekedar saling menghormat tapi yang diperlukan adalah rasa saling memiliki (*Sence of belonging*).⁸⁵

Gus Dur dalam pandangannya mengenai hubungan agama dan ideologi negara sering di perdebatkan oleh para pemikir-pemikir dari zaman ke zaman. Gus Dur memaparkan bahwa jalinan sangat kuat antara aspirasi keagamaan dan aspirasi di luar lingkup keagamaan (seperti penegak keadilan, penumbuhan demokrasi, penjagaan kelestarian alam dan pembangunan struktur ekonomi yang berwatak kerakyatan). Ajaran- ajaran agama justru dijadikan sumber inspirasional bagi aspirasi “non keagamaan” tersebut dikalangan gerakan-gerakan keagamaan yang menyajikan alternatif bagi sistem pemerintahan yang monolitis.⁸⁶

Gus Dur menyatakan bahwa Pancasila ditempatkan kaum muslim sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan Islam menjadi aqidah dalam kehidupan kaum muslim. Ideologi konstitusional tidak dipertentangkan dengan agama, tidak menjadi penggantinya dan tidak diperlakukan sebagai agama. Dengan demikian, tidak akan diberlakukan UU maupun peraturan yang bertentangan dengan ajaran agama.⁸⁷

⁸⁵ A.S Hikam, *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara), hlm. 16

⁸⁶ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: The wahid Institute, 2007), hlm. 164

⁸⁷ Syaiful Arif, *Humannisme Gus Dur Pergumulan Islam dan Kemanusiaan*,(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm.171

Pemikiran Gus Dur tentang hubungan agama dan negara sangat menarik, karena berada di ranah filosofis. Artinya Gus Dur ternyata bukan seorang ideolog Islam yang mencitakan terbentuknya masyarakat Islami secara total. Bukan pula kaum sekuler yang hendak memisahkan antara Islam dan negara. Akan tetapi Gus Dur adalah seorang muslim yang mendasarkan kemanfaatan paling mendasar dari politik, yakni kesejahteraan manusia, dari sumber-sumber keislaman. Dengan demikian secara esensial, Gus Dur tidak memisahkan Islam dari politik meskipun politik tersebut tidak harus berbentuk negara Islam.⁸⁸

Gus Dur menyatakan tidak adanya bentuk baku sebuah negara dan proses pemindahan kekuasaan dalam bentuk tetap yang ditinggalkan Rasulullah Muhammad SAW, baik melalui ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, membuat perubahan historis atas bangunan negara yang ada menjadi tidak terelakkan atau tercegah lagi. Dengan kata lain, kesepakatan akan bentuk negara tidak dilandaskan pada *dalil naqli* tetapi pada kebutuhan masyarakat pada suatu waktu.⁸⁹

Ada tiga pilar pemikiran Gus Dur pertama yaitu bahwa keyakinan bahwa Islam harus secara aktif dan substantif ditafsirkan ulang atau dirumuskan ulang agar tanggap terhadap tuntutan kehidupan modern. Kedua, dalam konteks Indonesia, bahwa Islam tidak boleh menjadi agama negara, dan ketiga bahwa Islam harus menjadi kekuatan yang inklusif, demokratis dan pluralis, bukan ideologi negara yang eksklusif.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 151

⁸⁹ Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), hlm. 56

Gus Dur menjelaskan mengenai hubungan Islam, negara dan Pancasila bahwa model hubungan pertama antara Islam dan Pancasila itu, yaitu agama mengejawantah dalam ideologi negara dan pandangan hidup bangsa dan negara merupakan kerangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang seharusnya diikuti oleh kaum muslimin. Negara kita merupakan negara yang majemuk dari susunan warganya maupun situasi geografisnya. Islam ternyata bukan satu-satunya agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, negara harus memberikan pelayanan yang adil kepada semua agama yang di akui. Sehingga menjadi jelas bahwa Pancasila dan Islam tidak memiliki pola hubungan yang bersifat *polaritatif* (kecenderungan), tetapi pola hubungan *dialogis* (terbuka atau komunikatif) yang sehat, yang berjalan terus-menerus secara dinamis.⁹⁰

Seharusnya semua pihak dikalangan kaum muslimin memikul tanggung jawab untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap semua warga masyarakat bangsa kita, karena hanya dengan cara demikian Islam dapat tumbuh menjadi kekuatan pelindung bagi seluruh penduduk negeri ini secara keseluruhan.⁹¹

Konsisten Gus Dur untuk mengembangkan demokrasi dan toleransi dalam negara Pancasila dapat dilihat pada pembentukan Forum Demokrasi dimana Gus Dur sendiri yang menjadi ketua forum tersebut. Gus Dur konsisten mengembangkan demokrasi dan pluralisme tidak saja dalam lingkungan eksternal kehidupan kebangsaan, melainkan juga dalam lingkungan internal NU.⁹²

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 93

⁹¹ A.S Hikam, *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara), hlm. 18

⁹² Ali Masykur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga), hlm.115

Hal yang mendasar dalam pemikiran Gus Dur mengenai hubungan Islam dengan kenegaraan mengarah pada Pancasila. Gus Dur berpikir dalam konteks dirinya sebagai warga NKRI menemukan ideal strategis bagi penerapan etika sosial islam di dalam negara Indonesia. Ideal strategis ini ialah Pancasila, yang diterimanya sebagai landasan konstitusional negara serta asas keorganisasian NU. Pada Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984 Gus Dur memaparkan bahwa Pancasila ditempatkan kaum muslim sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan Islam menjadi aqidah dalam kehidupan kaum muslim. Ideologi konstitusional tidak dipertentangkan dengan agama, tidak menjadi penggantinya dan tidak diberlakukan sebagai agama. Dengan demikian, tidak akan diberlakukan UU maupun peraturan yang bertentangan dengan ajaran agama.⁹³

Dari pemaparannya tersebut, terlihat jelas bahwa Gus Dur menempatkan Pancasila dan Islam secara proporsional. Pancasila adalah landasan konstitusional bernegara. Sementara Islam adalah akidah kehidupan masyarakat. Sebagai landasan konstitusional, Pancasila tentu tidak akan mampu menggantikan akidah sebab akidah berkaitan dengan dasar keyakinan hidup yang paling utama, sementara landasan konstitusi terkait dengan kebutuhan kolektif bernegara. Dengan adanya landasan konstitusional, Pancasila akan menjadi penjamin bagi

⁹³ Abdurrahman Wahid, *Islam, Ideologi dan Etos Nasional Kita, dalam Universalisme dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam*, Arifin Junaidi, Nardi (ed.), Edisi terbatas, 1991, hlm. 19.

kehidupan Islam itu sendiri, dengan ukuran tidak ada peraturan yang bertentangan dengan akidah Islam.⁹⁴

Gus Dur menyatakan bahwa tugas dari agama Islam adalah mengembangkan etika sosial yang memungkinkan tercapainya tujuan penyejahteraan kehidupan umat manusia, baik melalui bentuk masyarakat yang bernama negara maupun diluarnya. Fungsionalisasi etika sosial dapat saja berbentuk pengundangan melalui hukum formal, maupun sekedar melalui penyadaran masyarakat akan kepentingan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan nyata. Dari kesimpulan ini dapat diketahui bahwa universalitas nilai-nilai Islam dapat difungsikan sepenuhnya dalam sebuah masyarakat bangsa, terlepas dari bentuk negara yang digunakan.⁹⁵

Dalam pandangan Gus Dur, Islam anti untuk mendiskriminasi berbagai macam latar belakang apapun itu, tidak boleh adanya diskriminasi berdasarkan agama, diskriminasi berdasarkan suku dan diskriminasi adat istiadat. Gus Dur menyatakan dalam tulisannya bahwa diskriminasi memang ada di masa lampau, tetapi sekarang harus dikikis habis. Ini kalau kita ingin memiliki negara yang kuat dan bangsa yang besar. Perbedaan diantara kita, justru harus dianggap sebagai kekayaan bangsa. Berbeda, dalam pandangan Islam, wajar terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi pada tingkat sebuah bangsa besar, seperti masyarakat Indonesia.

⁹⁴ Syaiful Arif, *Humannisme Gus Dur Pergumulan Islam dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013) hlm. 171

⁹⁵ Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999) hlm. 77

Gus Dur meyakini bahwa ajaran yang dibawa oleh Islam adalah ajaran yang sempurna, dalam arti bahwa Islam telah menetapkan berbagai prinsip umum secara lengkap dan komprehensif agar dapat menjadi acuan dan panduan bagi manusia dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan. Gus Dur juga meyakini bahwa Islam adalah sebuah agama atau ajaran yang memuat nilai-nilai luhur dan universal yang selalu cocok dengan berbagai situasi dan kondisi. Untuk itu, dalam setiap kesempatan, Gus Dur selalu menekankan pada umat Islam agar tidak menjadikan perbedaan sebagai bencana, melainkan sebagai sebuah anugerah dan kekuatan yang harus disyukuri untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Menurutnya, perbedaan bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, Yang dilarang oleh agama adalah lahirnya perpecahan dan perselisihan akibat adanya perbedaan.⁹⁶

Dalam potongan ayat Q.S. Ali Imran/3: 103.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

“Berpeganglah kalian kepada tali Tuhan dan secara keseluruhan serta jangan terpecah-pecah dan saling bertentangan”⁹⁷

Ayat tersebut sangat jelas membedakan perbedaan pendapat dengan pertentangan, yang memang nyata-nyata dilarang.⁹⁸ Memperhatikan sifat pluralistas bangsa Indonesia tentang merosotnya semangat kebangsaan dan mengedepannya semangat agama, etnis, dan daerah telah menimbulkan solidaritas

⁹⁶ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 29.

⁹⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*, (Bandung: PT: Sygma Exagrafika, 2007), hlm. 63.

⁹⁸ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 154

sempit dalam bentuk keagamaan. Hal ini mendapat respon oleh Gus Dur yang menyatakan bahwa harus adanya nilai baru yang dikembangkan.

Pertama, haruslah dikembangkan semangat untuk tidak hanya menghormati orang lain, melainkan juga untuk untuk mengerti kesulitan yang dihadapinya. Kedua, harus ditumbuhkan kesadaran untuk mementingkan bangsa diatas kelompok sendiri. Pengembangan dari kedua nilai tersebut sangat penting untuk melahirkan solidaritas yang tulus dari berbagai kelompok etnis, agama, budaya dan lain sebagainya sebagai dasar dari pembentukan bangsa Indonesia.

Pendapat tersebut bukan hanya diucapkan beliau saja tapi juga beliau implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya saja sikap beliau dalam membela kepentingan minoritas non muslim, antara lain dalam bentuk kritik Gus Dur terhadap kasus Monitor dan pendirian ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia).

Oleh karena itu, dengan disertai hubungan kemanusiaan yang baik dengan semua kalangan, mereka merasa mendapat perlindungan dari Gus Dur. Hal ini terbukti, misalnya, ketika terjadi peristiwa huruhara pembakaran dan penjarahan kota Jakarta pada 14-15 Mei tahun 1998, banyak dari tokoh-tokoh non muslim mendatangi kediaman Gus Dur. Meski demikian, Gus Dur tetap membedakan sikap inklusivismenya dalam melihat agama-agama itu antara aspek teologi dengan aspek sosial.

Menurutnya, secara teologis terdapat perbedaan esensial antara agama-agama di dunia ini, karena masing-masing mengandung ajaran yang unik. Namun keunikan ini harus dikontrol dan dikaitkan dengan memberi perlakuan dan

kedudukan yang sama dimata hukum sebagai warga negara.⁹⁹

⁹⁹ Masykuri Abdillah, *Gus Dur Tentang Demokrasi dan Pluralisme*, Ahmad Fathoni Rodli dan Fahrudin Salim, *Berguru Kepada Bapak Bangsa*, hlm. 197